**TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP
TAYANGAN SEPAKBOLA YANG DISIARKAN SECARA LANGSUNG
MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Oleh: Sujarwadi

Program Kekhususan : Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH

Alamat: Jln. Kembang Harapan Sail Pekanbaru

Email / Telepon : bibitsujarwadi@gmail.com / 0822-8339-7090

ABSTRACT

Legal protection of copyright owners or holders is very necessary because advances in technology and information affect several areas, including copyright infringement, especially cinematography. Cinematographic work itself is one of the copyrighted works protected under Article 40 letter m of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Copyright Act). In this thesis, we will discuss: a legal assessment of copyright for cinematographic works uploaded to social media Instagram, how is the relationship between the use of the Live Broadcast feature and copyright infringement on cinematographic works, and efforts to prevent copyright infringement by Instagram, government and society. as Instagram users.

This research uses normative legal research methods. In normative legal research, written law is studied from various aspects of theory, philosophy, comparison, structure, consistency, explanation, formality and binding force of a law. This study also takes a legal approach and makes use of the types and sources of primary legal material, secondary legal material and non-legal material. As well as using the technique of collecting legal material with literature study.

The results of this research indicate that copyright infringement can mean taking, citing, recording, reproducing or announcing (part of) the creations of others, without the permission of the creator or copyright owner. So that this is a violation of moral rights and economic rights for Copyright Holders. As for the legal structure and content in Indonesia regarding the copyright of cinematographic works, it is quite adequate, but the regulation specific to the use of social media has not been significant. However, the existence of a non-ministerial government agency established by the president is a form of appreciation and protection for the creators of works in Indonesia. The occurrence of copyright infringement in cinematographic works is based on the lack of public knowledge of the applicable law, as well as on reasons of existence and current trends.

Keywords: Copyright Infringement, Social Media, Cinematography.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang dituangkan dan diimplementasikan ke dalam karya, seni, desain maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Munir Fuady menyatakan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya juga mencakup program komputer. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.²

Hak Cipta terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi merupakan "hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya". Hak ekonomi antara lain meliputi hak penyiaran, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi, dan hak pertunjukan. Hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta terutama yang bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral meliputi "hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya

pada ciptaan"³

Perkembangan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, telah memberikan kontribusi yang begitu besar dalam era globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang teknologi adalah internet. Dengan adanya internet secara tidak langsung memberikan dampak positif seperti akses informasi, hiburan, industri kreatif dan pemasaran produk yang mampu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, seperti halnya benda bergerak, maka Hak Cipta juga dapat beralih atau dialihkan melalui perjanjian yang disebut dengan lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta 2014, lisensi didefinisikan sebagai: "izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu". Perjanjian lisensi Hak Cipta secara hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan Hak Cipta.⁵

Pada era globalisasi seperti ini sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar mengenai semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara tepat dan cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Dampak dari pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.⁶

³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 4-5.

⁴ Asri, D. P. B. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020):2

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 101.

⁶ OK Saidin, Op cit., hlm. 47

¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, hlm.38.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditaya Bakti, Bandung, 2011, hlm.208.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat disusun penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan Fitur Siaran Langsung di instagram dan Hubungannya dengan Pelanggaran Hak Cipta pada karya Sinematografi?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta pada karya Sinematografi yang diunggah melalui Fitur Siaran Langsung di instagram?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan fitur layanan dan hubungannya dengan pelanggaran Hak Cipta pada karya Sinematografi
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi yang diunggah melalui fitur layanan siaran langsung di instagram.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis.
- b. Bagi dunia akademik, dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau dan kepada peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan pemikiran atau kerangka acuan dan pemikiran dan pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, halaman.12.

1. Konsep Hak Cipta

a. Ciptaan

Hak cipta merupakan sebuah cabang ilmu dari hak kekayaan intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, dalam tatanan dunia yang lebih modern merupakan sebuah konsep perlindungan yang amat penting karena berkaitan dengan adanya penghargaan terhadap karya seseorang. Hak kekayaan intelektual itu sendiri berasal dari istilah *intellectual property rights*. *Intellectual Property* menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah karya dari pikiran, yang berwujud penemuan, sastra dan karya-karya seni seperti desain, penggunaan simbol dan nama yang digunakan dalam perdagangan.¹ Kata Property menurut pendapat G.W.A Paton adalah sesuatu yang menunjukkan kepemilikan, dan terkadang kata tersebut diartikan sebagai sebuah aset yang mempunyai hak kepemilikan pribadi.⁸

Sesuai dengan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, HKI dikelompokkan secara tradisional ke dalam dua kelompok besar kekayaan intelektual :

b. Kekayaan Industrial (*industrial property*) terdiri atas :

- a) Invensi;
- b) Merek;
- c) Desain Industri;
- d) Desain tata letak sirkuit terpadu;

c. Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Terkait (*Neighboring Right*) terdiri dari hak-hak yang dipunyai :

- a) Pelaku pertunjukan (Performer)
- b) Produser Rekaman Suara
- c) Lembaga penyiaran

⁸ Erman Rajagukguk dan Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, 2009, halaman 2.

Sejarah berlakunya hak cipta (*auteursrecht*) sebetulnya telah bermula dalam Auteurswet 1912 karena di saat itu, Indonesia yang masih disebut sebagai negara Hindia Belanda diikut sertakan sebagai negara jajahan Belanda dalam Konvensi Bern pada 1 April 1913. Konvensi Bern itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) di bidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sehingga negara yang tergabung dalam konvensi tersebut secara bertimbal balik memiliki kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran atau kejahatan di bidang hak cipta.⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability* atau dapat diprediksi. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:¹⁰

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam

situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹²
- b. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta; 2012, halaman 134 dan 137.

¹⁰ Yulika Donna Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lipstik Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm.5

¹¹ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 85.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm.1470.

dibuat (dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹³

- c. Hak Cipta Merupakan Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang tujuannya itu untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, tujuannya agar mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan perlindungan hak cipta dari penggunaan layanan Live Streaming di media sosial.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen. Merupakan suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Kajian ini sangat berguna bagi penulis, misalnya untuk memberikan gambaran masalah yang

akan diteliti, memberikan dukungan teoritis konseptual bagi penulis, dan selanjutnya berguna sebagai bahan diskusi atau pembahasan dalam penelitian.¹⁶

3. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan-peraturan di bidang Hak Cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual'

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.¹⁷

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.¹⁸

Menurut Arthur Lewis, umumnya hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebut semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, seperti gagasan, invensi, puisi, desain, dan lain-

¹³ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

¹⁴ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 168

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 25.

¹⁶ Punaji Setyosari, *Metodologi Pendidikan dan Pengembangan Edisi Keempat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 118.

¹⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

lain. Berbicara mengenai tentang kekayaan intelektual juga berbicara tentang hak-hak dan perlindungannya, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Terlihat bahwa hak-hak ini terutama memberikan pemiliknya menguasai dan menikmati manfaat-manfaat dari karyanya tersebut dalam periode atau batas waktu tertentu. Hukum memberikan hak kepada pemilik kekayaan intelektual agar dapat menarik manfaat dari waktu dan biaya yang telah dikeluarkannya dalam memproduksi sesuatu itu.¹⁹

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPperdata. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPperdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).²⁰

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahannya antara hak kekayaan

intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).²¹

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)²²

Hak Cipta sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi kedalam dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta dan
2. Hak yang berkaitan dengan hak cipta atau *neighbouring rights*.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebagai pendahuluan, patut dipahami terlebih dahulu bahwa Hak Cipta adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang melindungi hak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang berguna bagi manusia. Hal ini tercakup dalam Pasal 1 UU Hak Cipta 2014.²⁴ Pengertian Hak Cipta dalam UU Hak Cipta 2014 diatur dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²¹ OK. Saidin 1, op.cit, h.13

²² OK Saidin, op.cit., halaman 13.

²³ *Ibid.*, halaman 16.

²⁴ R. Diah Imaningrum Susanti, Op cit., hlm.

¹⁹ Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.335.

²⁰ OK. Saidin 1, Op.cit, h.11

undangan”.

Dalam Black's Law Dictionary, Hak Cipta (*Copyrights*) diartikan:

*The right to copy; specifically, a property right in an original work of authorship (including literary, musical, dramatic, choreographic, pictorial, graphic, sculptural, and architectural works; motion pictures and other audiovisual works; and sound recordings) fixed in any tangible medium of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce, adapt, distribute, perform, and display the work.*²⁵

2. Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

Hak Cipta di Indonesia mengandung dua jenis hak, yaitu hak eksklusif dan hak terkait. Dua jenis hak ini juga secara eksplisit disebutkan dalam UU Hak Cipta 2014. Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Keduanya lazim disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.²⁶

Istilah hak moral berawal dari bahasa Perancis, *droit morale*, yang merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta hidup atau mati, karyanya tetap melekat

pada dirinya. Pengakuan yang penuh atas hak moral merupakan konsep yang mutakhir dalam hukum hak cipta.²⁷

Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*).

3. Karya Sinematografi Sebagai Bagian Dari Hak Cipta

Kata sinematografi berasal dari Bahasa Inggris "*cinematography*" yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin yaitu *kinema* yang artinya gerak, *photos* yang artinya cahaya, dan *graphos* yang berarti lukisan atau tulisan. Jadi sinematografi memiliki arti sebagai melukis gerak dengan bantuan cahaya.²⁸

Pengertian umum sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetika melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Pemahaman

²⁵ Bryan A Garner and Henry C Black, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, St. Paul, Minn: West, 2009, p. 386, diakses tanggal 27 Mei 2022.

²⁶ Henry Soelistyo, Op cit., hlm. 47.

²⁷ R. Diah Imaningrum Susanti, Op cit., hlm. 39-40.

²⁸ Estu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam *Jurnal Dinamika Pendidikan UNY*, No.2/TA.XVIII/September 2011, hlm. 103.

estetika dalam seni, bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi.²⁹

Karya Sinematografi dapat dikatakan sebagai Hak Cipta Subjek Pertama, artinya seseorang yang berdasarkan kemampuan pikirannya, imajinasi, kecekatan, keterampilan, serta keahlian mereka kemudian dituangkan dalam bentuk yang khas dan hal itu bersifat sangat pribadi. Pembuatan suatu karya sinematografi memerlukan banyak dana, teknik serta tahapan yang secara khusus untuk dituangkan dari imajinasi ke visualisasi agar dapat dinikmati oleh semua orang sehingga haruslah dihargai. Karena ketika terjadinya suatu pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, *royalty* atau keuntungan yang menjadi hak dari si pencipta tidak di dapatkan oleh si pencipta.³⁰

4. Sarana Kontrol Teknologi

Instrumen hukum sarana kontrol teknologi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah media baru dalam instrumen hukum hak cipta. Sarana kontrol teknologi itu menjadi sangat penting karena hal ini berhubungan dengan aspek pendaftaran, pencatatan, dan pengamanan hak cipta serta digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait.

Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta memberi penegasan agar setiap orang tidak melakukan perusakan, pemusnahan, penghilangan, agar tidak membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, atau diperjanjikan oleh pencipta dengan pihak lain terkait.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang. Kemajuan teknologi telah mengantarkan manusia untuk menciptakan bentuk baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi, salah satunya adalah inovasi teknologi komunikasi berupa media sosial.³²

Media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak.³³

Sedangkan media sosial dikutip dari Wikipedia, mendefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *jejaring sosial*, *wiki*, *forum* dan *dunia virtual*. *Blog*, *jejaring sosial* dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁴

Memang tak bisa dipungkiri, bahwa manusia modern saat ini sangat tergantung hidupnya pada teknologi. Kehadiran Internet yang diikuti dengan munculnya media sosial didalamnya membawa pula berbagai masalah etika berkomunikasi. Penggunaan identitas palsu untuk kepentingan yang “negatif”, penyebaran dan pengunduhan materi yang dilindungi Hak Cipta atau materi yang dilarang, merupakan hal yang melanggar etika dan

²⁹ H. Ok Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 330.

³⁰ Ni Made Rian Ayu Sumardani, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online*, dalam *e-Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Universitas Udayana*, Vol. 6 No.3, 2018, hlm. 6-7.

³¹ H. OK. Saidin, Op.cit, h.292

³² Bimo Mahendra, “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (sebuah perspektif komunikasi)”, *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 16, Nomor 01, Mei 2017, diakses, 28 Mei 2022 hlm. 152.

³³ Pengertian media, <https://kbbi.web.id/media> (online), diakses, tanggal, 28 Mei 2022.

³⁴ Pengertian media sosial, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses, tanggal, 28 Mei 2022.

dilarang.

1. Instagram

Instagram (juga disebut IG atau Insta) adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.³⁵

Nama *Instagram* berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, *Instagram* juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “Telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.³⁶

Saat ini *Instagram* menjadi salah satu media sosial yang sedang banyak digunakan oleh pengguna *gadget*. “*Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.”³⁷

2. Pengguna Aplikasi Instagram

Pengguna *Instagram* berkaitan dengan struktur sosial antara pelaku, sebagian besar individu, atau organisasi, yang menunjukkan cara mereka terhubung melalui berbagai hubungan sosial seperti persahabatan, rekan kerja, atau pertukaran informasi.³⁸

Meskipun merupakan aplikasi baru, pengguna *Instagram* telah mencapai 1

juta orang pada Desember 2010. Awal Januari 2011 *Instagram* menambahkan *hashtags* untuk lebih memudahkan pengguna menemukan foto yang mereka cari. Sistem sosial di dalam *Instagram* adalah dengan mengikuti *following* akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut *followers* akun *Instagram* miliknya.³⁹

Saat ini aplikasi pada *Instagram* banyak menggunakan fitur yang memudahkan dan menarik bagi remaja untuk menggunakannya.

Motif pengguna dalam menggunakan *Instagram* sebagai media komunikasi, difokuskan pada motif penggunaan media menurut pendapat McQuail, Blumler dan Brown yang menggunakan kategori-kategori berikut:

- a) Informasi yaitu informasi mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang melakukan sesuatu.
- b) Identitas pribadi yaitu penguatan nilai atau penambah keyakinan, pemahaman diri, eksplorasi realitas, dan sebagainya.
- c) Hubungan personal yaitu manfaat sosial informasi dalam percakapan, pengganti media untuk kepentingan perkawanan.⁴⁰

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penggunaan Layanan Siaran Langsung dan Hubungannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Sinematografi.

1. Pengertian dan Cara Menggunakan Layanan Siaran Langsung yang Diunggah oleh Pengguna Instagram.

Siaran Langsung pada media social *instagram* merupakan salah satu bentuk layanan *Instasory* yang diberikan oleh

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Asal – usul kata *Instagram* (online), <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses, tanggal 28 Mei 2022.

³⁷ Pengertian *Instagram* (online) <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses. 28 Mei 2022.

³⁸ Mahendra loc.cit, halaman 155.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Adinda Meidina Lubis, “Instagram Dan Pemenuhan Kebutuhan Pengguna Instagram Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Usu” (*Jurnal fisip usu* 2012), halaman 5.

pihak instagram kepada penggunanya yang bertujuan agar si pengguna dapat menyiarkan video langsung yang dapat dilihat oleh pengikutnya yang nantinya juga dapat disimpan menjadi instagram story.⁴¹

Fitur Siaran Langsung merupakan fitur untuk berbagi cerita secara langsung kepada pengikut instagram. Pengikut instagram dapat bergabung dan memberikan komentar di dalam siaran langsung tersebut.

Interaksi langsung memang sedang populer, baik melalui video call maupun dengan cara live seperti ini, yang memungkinkan lebih banyak orang yang dapat bergabung dalam interaksi tersebut.

Cara melakukan Siaran Langsung di media social instagram sangatlah mudah untuk dilakukan, dimana langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi instagram
- 2) Menggeser layar (*swipe*) ke arah kanan atau dengan menekan tombol kamera di pojok kiri atas.
- 3) Di bawah tombol rekam (lingkaran di bagian bawah tengah) ada beberapa pilihan.
- 4) Geser/*swipe* ke kanan pilihan itu untuk memilih "LIVE" (tekan tombolnya langsung juga bisa).

2. Hak Terkait

UU Hak Cipta mengatur tentang *neighboring rights* dengan menggunakan istilah hak terkait. Undang-Undang ini merumuskan tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁴² Istilah *neighboring rights* dalam perlindungan

⁴¹

<http://www.google.com/amp/s/dotnxdigital.com/ca-ra-menggunakan-instagram-live/amp/>, diakses, tanggal 27 Mei 2022.

⁴² Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan dalam UU Hak Cipta Indonesia menerjemahkannya dengan istilah yang berkaitan dengan hak cipta.⁴³

Tentang hak terkait ini, UU Hak Cipta lebih tegas memberikan batasan. Seperti dimuat dalam Pasal 49, secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *neighboring rights*, yang meliputi:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya.
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

3. Praktik Pelanggaran Hak Cipta dalam Layanan Siaran Langsung

Mengenai pengaturan untuk melindungi Hak Cipta telah diatur oleh UU Hak Cipta, yang mana UU Hak Cipta tersebut menjamin kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.

Permasalahan muncul ketika terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat (praktik) dimana

⁴³ H. OK. Saidin, Op.cit, hlm.304

masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan mengunggah konten yang memiliki Hak Cipta ke dalam Instastory mereka.

Mengenai batasan Hak Cipta tercantum dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada poin d;

“Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Yang artinya bahwa, meskipun tidak ditujukan untuk komersial, namun ada batasan dimana tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta memberikan keuntungan kepada Pencipta maupun pihak terkait. Sedangkan pada kenyataannya, ada efek-efek yang timbul dan menyebabkan kerugian bagi Pencipta dan pihak terkait jika masyarakat mengunggah tayangan sepakbola yang sedang berlangsung di televisi ke aplikasi instagram. Serta kebanyakan dari insan kreatif menyatakan keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan melalui Instastory ataupun media sosial lainnya, hal ini dapat diketahui karena pelarangan untuk merekam tayangan sepakbola yang sedang berlangsung dalam bentuk apapun tersebar dimana-mana.

B. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Siematografi yang diunggah Melalui Fitur Siaran Langsung di Instagram.

1. Upaya Pencegahan Melalui Aplikasi Instagram

Aplikasi Instagram sendiri mempunyai ketentuan dalam penggunaan media sosialnya, yang mana sebelum seorang calon pengguna

membuat akun pribadi miliknya, ia harus menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Instagram dengan cara menyentang pada kolom yang disediakan.

Ketentuan penggunaan tersebut mengatur penggunaan Instagram dan menyediakan informasi tentang layanan Instagram seperti semua produk, fitur, aplikasi, layanan, teknologi, dan perangkat lunak Instagram yang digunakan Instagram untuk melaksanakan misinya, yaitu mendekatkan pengguna Instagram dengan orang-orang atau hal-hal yang disukainya.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Instagram tercantum dalam ketentuan penggunaan, di dalam poin **“Cara yang Tidak Diperbolehkan Dalam Menggunakan Instagram”**.⁴⁴ Menyediakan layanan yang aman dan terbuka bagi siapa pun untuk komunitas yang luas merupakan tujuan dari Instagram.

2. Upaya Pencegahan Melalui Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada Hak Cipta. Dalam upaya melindungi Hak Cipta di Indonesia, perlu adanya tindakan pencegahan yang dilakukan secara resmi oleh Pemerintah untuk mendukung kreativitas masyarakat dalam menyokong perekonomian Bangsa khususnya dalam bidang Ekonomi Kreatif.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiayang dipimpin oleh seorang Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

⁴⁴“Ketentuan Penggunaan Instagram”, <http://www.help.instagram.com>, diakses, tanggal 27 Mei 2022

kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

3. Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat sebagai Pengguna Instagram.

Masyarakat sebenarnya juga ikut berpartisipasi atau dapat mengambil peran dalam upaya pencegahan terhadap pelanggaran Hak Cipta seperti yang ditegaskan pada Pasal 55 UU Hak Cipta bahwasannya masyarakat berhak untuk melaporkan kepada menteri apabila mendapati pelanggaran terhadap Hak Cipta menggunakan sistem elektronik untuk kegiatan komersil, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan dari hasil temuan tersebut apakah perlu tindakan untuk *mentake-down* konten tersebut.⁴⁶

Selain melaporkan kepada menteri, masyarakat sebagai pengguna instagram juga dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara *mereport*/melaporkan akun-akun yang melakukan Siaran Langsung tayangan sepakbola melalui aplikasi instagram itu sendiri, yang dimana nantinya pihak instagram sendirilah yang akan *mentake-down* Siaran Langsung akun-akun tersebut apabila terbukti melakukan tindakan pelanggaran Hak Cipta.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik Hak Cipta atau pihak terkait dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan mengambil,

mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyiaran secara langsung tayangan sepakbola di media social instagram masih sering terjadi hingga saat ini. Meskipun kebanyakan mengetahui hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Cipta, tetapi masih banyak yang tidak peduli dan tetap melakukan perbuatan melanggar tersebut.

2. Sebagai bentuk penghargaan terhadap hak orang lain, khususnya pada Hak Cipta, berbagai pihak mengupayakan agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Cipta khususnya pada karya Sinematografi. Sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Instagram, yaitu dengan meluncurkan Ketentuan Penggunaan yang harus disetujui oleh setiap pengguna sebelum membuat akun Instagram. Ketentuan tersebut berupa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna beserta dengan sanksi jika pengguna ingkar atas perjanjiannya. Pihak pemerintah dalam upayanya yaitu membentuk produk hukum yang menjanjikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak cipta serta membentuk lembaga non kementerian untuk mengoptimalkan hasil dari Ekonomi Kreatif Indonesia. Upaya pencegahan melalui pihak masyarakat yaitu dengan cara melaporkan kepada menteri dan dapat juga *mereport*/melaporkan secara langsung ke pihak instagram.

B. Saran

1. Untuk mengakomodir pengaturan hukum mengenai media sosial pada umumnya dan penggunaan fitur Siaran Langsung dari Instagram pada khususnya, penulis menyarankan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mengatur setiap unggahan yang

⁴⁵ Struktur Organisasi” <http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi>, diakses, tanggal 27 Mei 2022.

⁴⁶ Wulandari, Asri, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Steaming Sepakbola di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2021, hlm. 10.

- ditampilkan oleh fitur Siaran Langsung dari Instagram secara terperinci untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta di kemudian hari. Serta peran dari lembaga-lembaga yang mengawasi pelanggaran Hak Cipta, sebaiknya lebih memberikan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat disamping membuat produk hukumnya.
2. Kepada para pengguna Instagram sebaiknya memikirkan terlebih dahulu dampak atau akibat sebelum membuat suatu konten untuk diunggah ke media sosial khususnya dalam hal mengunggah tayangan sepakbola ke media social instagram. Penulis menyarankan agar masyarakat membuka wawasan terhadap hal-hal yang dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran Hak Cipta, juga berperan aktif dalam memberikan teguran kepada pelaku di media sosial.
 3. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta pada media sosial yang lebih luas serta perlindungan bagi Pencipta, penulis menyarankan pencegahan yang lebih spesifik yaitu melalui pengawasan secara komprehensif baik dari pihak Instagram, pihak pemerintah, maupun pihak masyarakat sebagai pengguna instagram itu sendiri serta pengaturan hukum Hak Cipta yang mencakup seluruh hak Pencipta yang ada di dalam ciptaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi Kurnia, 2019, *Oase Iman di Media Sosial*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arthur Lewis, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung.
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Budi Agus Riswandi, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2018, *“Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia”*. Swasta Nulus, Denpasar.
- Eddy Darmian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Alumni, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Erman Rajagukguk dan Budi Agus Riswandi, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Depok.
- Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditaya Bakti, Bandung.
- Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visi Media, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Nisrina, 2015, *Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*, Yogyakarta.

- Ok Saidin, 2016, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society*, Alumni Bandung.
- Punaji Setyosari, 2013, *Metodologi Pendidikan dan Pengembangan Edisi Keempat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Subekti, 2006, *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- B. Jurnal**
- Adinda Meidina Lubis, "Instagram Dan Pemenuhan Kebutuhan Pengguna Instagram Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Usu" (*Jurnal fisip usu* 2012),
- Asri, D. P. B, 2020, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, No.1
- Bimo Mahendra, "Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (sebuah perspektif komunikasi)", *Jurnal Visi Komunikasi*, Volume 16, Nomor 01, Mei 2017.
- Bryan A. Garner (ed), 2014, *Blacks Law Dictionary Tenth Edition*, Thompson West, Minnesota.
- Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial", (*Jurnal Ilmu Komunikasi*, volume3, nomor 01, Edisi Juli 2011),
- Estu Miyarso, Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam *Jurnal Dinamika Pendidikan* UNY, No.2/TA.XVIII/September 2011.
- Etty Susilowati dalam Sujana Donandi, Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam *Jurnal Problematika Hukum*, Vol. 1 No.2, 2016.
- Febri Dwi Setiawan, *Pelindungan Hak Cipta atas Program Televisi*, <http://ejournal.uin.suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1247/1076>, Februari.
- Judgment of United States District Court, 2011, "Memorandum and Order" No. C 09-05665 MHP. N.D, California.
- Kusela, Opi, 2020, "Perjanjian endorsement di media sosial Instagram dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Matompo, Osgar Sahim. 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.1.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Relasi Hukum, Moral dan Hak Kekayaan Intelektual*

- (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup di Indonesia), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 1, Januari 2011
- Ni Made Rian Ayu Sumardani, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, dalam *e-Journal Ilmu Hukum* Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 6 No.3, 2018.
- Richard Stim, 2010, *Patent, Copyright, and Trademark*, NOLO, Barkeley, California
- Sulasno, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, dalam Adil: *Jurnal Hukum* Desember 2012 Vol 3 No.2,
- WIPO, *What is Intellectual Property*, <http://www.wipo.int/about-ip/en/>. Diakses Pada Tanggal 21 April 2022, Pukul 16.34 WIB, Diterjemahkan oleh Google Translate.
- Wulandari, Asri, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Steaming Sepakbola di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2021.
- Yulika Donna Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lipstik Yang Tidak Memiliki Label Kadaluarsa*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- <http://www.google.com/amp/s/dotnxdigital.com/cara-menggunakan-instagram-live/amp/>, diakses, tanggal 27 Mei 2022.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses, 28 Mei 2022,
- [https://id-id.facebook.com/gpa/blog/instagram-live \(2019\)](https://id-id.facebook.com/gpa/blog/instagram-live-(2019)), diakses, tanggal 21 April 2022.
- https://id-id.facebook.com/help/instagram/272122157758915/?helpref=hc_fnav, diakses, tanggal 21 April 2022.
- <https://kbbi.web.id/media> (online), diakses, 28 Mei 2022.
- <http://www.kompas.com/>, diakses, 28 Mei 2022.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec626ed475bddea497323230313039.html>, diakses, tanggal 4 Juni 2022.
- <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04940044/hati-hati-tayangkan-konten-televisi-ke-media-sosial-jika-tak-berizin-bisa-diseret-ke-pengadilan>, diakses tanggal 21 April 2022.
- <http://urbandigital.id/cara-membuat-live-video-instagram/>, diakses, 27 Mei 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. Website

<http://adhityanugrahanovianta.blogspot.com/2017/11/teori-kepastian-hukum-gustavrabruch.html>, diakses, tanggal 21 April 2022.

<http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi>, diakses, tanggal 27 Mei 2022.